

PERAN PESANTREN DALAM PEMBENTUKAN KESADARAN POLITIK ISLAM DI INDONESIA

THE ROLE OF ISLAMIC BOARDING SCHOOL IN FORMING ISLAMIC POLITICAL AWARENESS IN INDONESIA

Giofani Hutri Engzelli S¹, Frans Tory Damara Pradipta², Raihan Azaki³,
Tharischa Zulkarnain⁴, Ameliaanam⁵

¹Universitas Bangka Belitung
giofanihutriengzelli@gmail.com

²Universitas Bangka Belitung
franstorydamara@gmail.com

³Universitas Bangka Belitung
raihanazaki@gmail.com

⁴Universitas Bangka Belitung
zulkarnain@gmail.com

⁵Universitas Bangka Belitung
ameliaanam@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi pesantren sebagai institusi pendidikan Islam dalam mengembangkan kesadaran politik Islam di Indonesia. Dalam masyarakat yang didominasi oleh muslim, pesantren memiliki peran yang lebih luas daripada sekadar lembaga pendidikan agama. Mereka juga berfungsi sebagai agen sosialisasi politik, dengan memberikan pengajaran tentang nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan kepemimpinan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan analisis pustaka, artikel ini menyelidiki berbagai aktivitas yang meliputi diskusi kitab kuning, forum khitabiyah, praktik demokrasi internal, serta kajian Bahts Al-Masail. Aktivitas-aktivitas tersebut berkontribusi secara signifikan dalam pembentukan pemikiran politik di kalangan santri secara alami. Peranan kiai sangat penting dalam memperkuat keberadaan pesantren sebagai tempat yang berfungsi untuk membentuk karakter politik yang moderat dan memiliki sikap kritis. Walaupun demikian, pesantren kini menghadapi sejumlah tantangan sebagai dampak dari arus modernisasi dan perkembangan era digital. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam kurikulum serta peningkatan literasi politik di kalangan santri. Penelitian terbaru mengungkapkan bahwa pesantren memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran politik di kalangan umat Islam dengan cara yang demokratis dan inklusif. Hal ini dilakukan sambil tetap mengedepankan etika serta nilai-nilai dalam ajaran Islam.

Kata kunci: Pesantren, Politik Islam, Kesadaran Politik, Pendidikan Politik, Santri.

Abstract

This research aims to analyze the role of pesantren as an Islamic educational institution in developing Islamic political awareness in Indonesia. In a society dominated by Muslims, pesantren play a broader role than merely being religious educational institutions. They also function as agents of political socialization, providing teachings on the values of democracy, tolerance, and leadership. Using a descriptive qualitative approach and literature analysis, this article investigates

various activities including discussions of classical texts, khutbah forums, internal democratic practices, and the study of Bahts Al-Masail. These activities significantly contribute to the natural formation of political thought among students. The role of kiai is crucial in strengthening the existence of pesantren as places that shape moderate political character and critical attitudes. Nevertheless, pesantren currently face several challenges as a result of modernization and the developments of the digital era. Therefore, reforms in the curriculum and an increase in political literacy among students are necessary. Recent research reveals that pesantren play an important role in enhancing political awareness among Muslims in a democratic and inclusive manner, while still prioritizing ethics and values in Islamic teachings.

Keywords: *pesantren, Islamic politics, political awareness, political education, santri.*

PENDAHULUAN

Politik Islam dapat dipahami sebagai perwujudan pelaksanaan seluruh syariat Islam dan keyakinannya dalam upaya memimpin dan mengelola pemerintahan. Politik Islam tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila unsur-unsur pentingnya tidak saling mendukung. Salah satu komponen yang memiliki peran krusial dalam tercapainya politik Islam adalah ulama. Mereka memberikan kontribusi yang sangat besar dalam menjaga akidah politik negeri ini agar selalu sesuai dengan syariat dan aturan Islam . Tanpa keterlibatan aktif para ulama, tujuan politik Islam akan sulit tercapai. Oleh karena itu, kerjasama dan sinergi antar ulama serta komponen politik lainnya sangat diperlukan untuk mengarahkan negara ke arah prinsip-prinsip Islam yang benar.

Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, diharapkan selalu memiliki pemimpin yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Pemimpin diharapkan mampu menegakkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama. Tentu saja, capaian tersebut dapat diraih melalui keseimbangan peran para ulama dalam senantiasa membimbing dan memberikan kritikan kepada pimpinan sesuai dengan norma-norma syariat dan aqidah. Hal ini ditujukan kepada para pemimpin pemerintahan untuk menciptakan pemimpin yang berdasarkan pada nilai-nilai Islam .

Dalam dunia politik, menjaga dan mengendalikan kebijakan para penguasa sangatlah penting, terutama ketika berhadapan dengan pihak oposisi. Cendekiawan memiliki dua peran. penting yang sangat signifikan. Pertama, berdasarkan tingkat keilmuannya, ulama seharusnya berfungsi sebagai pencerah dalam pemikiran umat.

Kedua, sosok ini berperan sebagai panutan umat, khususnya dalam hal keteladanan moral yang diajarkan dan dicontohkan oleh para ulama kepada masyarakat. Peran ulama sering kali memiliki dampak signifikan terhadap kemajuan masyarakat.

Banyak orang berpendapat bahwa berbagai hal tidak memiliki dampak terhadap keadaan masyarakat. Keberlangsungan suatu negara dapat terancam jika salah satu elemen kunci, yaitu warganya, mengalami dampak kerusakan yang signifikan. Al-Ghazali menjelaskan bahwa kerusakan yang dialami oleh masyarakat, atau raiyyah, diakibatkan oleh kebobrokan para pemimpin, yang dikenal sebagai umara. Selanjutnya, kerusakan para pemimpin itu sendiri berakar dari kehampaan yang terjadi di kalangan ulama atau ilmuwan. Kondisi buruk yang menimpa para ulama sering kali disebabkan oleh penghimpunan kekayaan dan posisi sosial. Dengan demikian, keadaan umat Islam sangat tergantung pada peran dan integritas ulama dalam masyarakat.

Apabila di tengah-tengah masyarakat terdapat banyak ulama, maka umat akan menerima hidayah dan petunjuk, yang pada gilirannya akan membawa perbaikan dalam kehidupan umat tersebut. Di sisi lain, apabila jumlah ulama terus menurun, maka umat akan semakin terasing dari petunjuk dan cahaya hidayah. Hal ini akan berdampak negatif pada kualitas kehidupan, menyebabkan berbagai masalah dan kerusakan dalam masyarakat. Pesantren merupakan sebuah institusi yang menyimpan banyak fenomena menarik untuk dianalisis dan diteliti.

Berbagai dinamika kehidupan dan pembelajaran dapat ditemukan pada pesantren, menjadikannya objek kajian yang sangat menarik. Terdapat berbagai aspek dalam perilaku masyarakat yang mencakup psikologi, pendidikan, serta tidak mengabaikan sudut pandang politik. Tidak mengherankan jika saat ini banyak penelitian yang mengeksplorasi keterlibatan pesantren dalam dunia politik. Politik Indonesia saat ini menunjukkan keberagaman yang signifikan, terutama terlihat dari banyaknya anggota legislatif dan pemimpin pemerintahan yang berasal dari latar belakang pesantren. Keberadaan alumnus pesantren dalam dunia politik semakin mengukuhkan peran penting lembaga pendidikan Islam ini dalam membentuk pemimpin masa depan.

Di pondok pesantren, para santri tidak hanya sekadar menerima pendidikan

mengenai ilmu agama Islam. Mereka juga diajarkan berbagai keterampilan, seperti menulis, manajemen diri, dan kemampuan hidup yang esensial. Selain itu, penanaman akhlak, kepercayaan diri, kemandirian, penguasaan bahasa asing, serta pemahaman tentang kitab-kitab agama dan nilai-nilai kesederhanaan juga menjadi bagian integral dari proses belajar di sana. Bahkan, dasar-dasar politik pun turut diperkenalkan, mempersiapkan santri untuk menghadapi tantangan kehidupan yang lebih luas. Dalam pembahasan sebelumnya mengenai fenomena yang terdapat di pesantren, perlu dicatat bahwa ukuran keberhasilan di lingkungan tersebut tidak memiliki patokan atau standar yang seragam. Setiap pesantren memiliki karakteristiknya sendiri, dan perbedaan ini sangat dipengaruhi oleh niat serta usaha yang dilakukan oleh santri masing-masing.

Dalam lingkungan pesantren, terdapat suatu sistem yang menunjukkan tingkatan terendah dalam penguasaan ilmu yang saling terkait, di mana kiai berperan sebagai pusat dari struktur pondok pesantren tersebut. Kiai adalah figur yang menyediakan fondasi bagi suatu sistem. Kedua, para santri yang mendalami ilmu pengetahuan agama Islam di bawah bimbingan kiai. Ketiga, lembaga pendidikan yang berupa pondok atau asrama diorganisir oleh kiai untuk mendukung kebutuhan santri dalam proses belajar mereka. Keempat, pembelajaran kitab kuning, dan yang terakhir, masjid berfungsi sebagai pusat ibadah sekaligus tempat untuk belajar dan mengajar.

Dapat disimpulkan bahwa pesantren merupakan sebuah komunitas perumahan yang terdiri dari berbagai fasilitas seperti rumah, asrama, ruang belajar, dan masjid. Dari perspektif kepemimpinan di pondok pesantren, struktur yang ada cenderung bersifat sentralistik dan hierarkis. Dalam sistem ini, kekuasaan dan pengambilan keputusan terpusat pada sosok kiai atau pemimpin pondok pesantren sebagai figura utama. Seorang pemimpin pesantren memiliki peran penting dalam mengelola kemajuan dan kehidupan sehari-hari pesantren tersebut. Tugas ini memerlukan keahlian, kedalaman ilmu, kharisma, serta keterampilan yang memadai. Namun, sering kali ditemukan bahwa sebuah pesantren tidak memiliki sistem manajemen pendidikan yang teratur, disebabkan oleh kenyataan bahwa segala keputusan dan kebijakan bergantung pada kebijaksanaan kiai.

Membicarakan tentang fenomena pengaruh pimpinan pesantren dalam arena politik bukanlah hal yang asing. Saat ini, kita dapat menemukan banyak contoh nyata yang menunjukkan keterlibatan pimpinan dan ustaz pesantren dalam dunia politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi aktif dapat dilakukan melalui berbagai peran, seperti menjabat sebagai pengurus partai politik, berperan sebagai juru kampanye, atau menjadi anggota legislatif, antara lain. Secara tidak langsung, dukungan dapat diberikan kepada partai politik atau individu, baik yang berstatus sebagai calon legislatif maupun eksekutif. Dalam perspektif normatif, partisipasi pimpinan pesantren dalam arena politik telah didukung oleh landasan hukum yang kokoh serta kuat sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Secara empiris, keterlibatan pimpinan pesantren sebagai sosok politik telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Sejarah politik di Indonesia menunjukkan bahwa pimpinan pesantren telah berperan aktif sejak lama. Mereka telah terlibat dalam berbagai fase sejarah, mulai dari masa pra-kemerdekaan, orde lama, hingga orde baru serta reformasi saat ini. Meskipun terdapat perbedaan dalam kuantitas dan kualitas keterlibatan di setiap era, pengaruh mereka tetap signifikan dalam perkembangan politik di tanah air. Seorang pemimpin pesantren memainkan peran yang signifikan dalam dinamika politik yang beragam di Indonesia. Fenomena ini telah menarik perhatian masyarakat, termasuk kalangan bawah, karena sosok kiai selama ini di beberapa daerah dikenal luas sebagai pendidik moral dan intelektual umat. Namun, keterlibatan pesantren dalam politik juga menimbulkan tantangan. Keterlibatan kiai terhadap politik melalui pesantren dapat mempengaruhi pandangan umat Islam, dan memicu penilaian bahwa kedudukan Kiai yang dimiliki hanya sebagai afiliasi politik.

Dalam menganalisis masalah tersebut, tulisan ini menggunakan teori sosialisasi politik dan pendidikan politik. Sosialisasi politik merupakan sebuah proses penting yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman individu mengenai politik. Proses ini mencakup berbagai aspek, seperti cara penyelenggaraan pemerintahan oleh negara, hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap warga negara, serta berbagai metode yang digunakan oleh masyarakat untuk berpartisipasi

dalam kegiatan politik. Sosialisasi politik membantu membentuk wawasan dan pengetahuan masyarakat mengenai peran serta tanggung jawab mereka dalam sistem pemerintahan. Proses ini memiliki peranan krusial dalam membentuk individu yang menyadari pentingnya partisipasi dalam kehidupan politik.

Menurut Almond dan Verba (1963), proses sosialisasi politik dapat dipengaruhi oleh berbagai agen sosial yang meliputi keluarga, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, serta media massa. Pesantren memiliki peran krusial sebagai agen sosialisasi politik yang efektif. Hubungan yang erat dengan masyarakat serta keberadaan kiai sebagai pembimbing bagi para santri menjadi faktor pendukung utama dalam proses ini. Berdasarkan pendapat Haryanto (2017), proses sosialisasi politik di lingkungan pesantren dilakukan dengan cara mengajarkan nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab sosial. Santri, sebagai kelompok pelajar, tidak hanya mendalami pengetahuan agama, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai yang mendorong mereka untuk terlibat secara aktif dalam kehidupan sosial dan politik.

Kiai memegang peranan penting sebagai pusat kepemimpinan dan panutan moral dalam masyarakat. Tugas mereka tidak hanya terbatas pada pengajaran ilmu agama, melainkan juga berfungsi sebagai referensi dalam menghadapi berbagai isu sosial dan politik yang tengah berlangsung. Teladan yang diberikan oleh para kiai dalam sikap dan tindakan mereka dapat berfungsi sebagai alat sosialisasi politik yang sangat efektif bagi para santri. Dalam konteks teori sosialisasi politik, pesantren berperan sebagai institusi yang sangat penting dalam proses penanaman nilai-nilai moral.

Kesadaran politik yang dibentuk oleh pesantren dalam tradisi Islam akhirnya berkontribusi pada peningkatan partisipasi politik umat dengan cara yang cerdas, kritis, dan bermartabat dalam konteks demokrasi. Penelitian ini mengungkapkan adanya hubungan yang signifikan antara teori sosialisasi politik, kesadaran politik, dan pesantren. Ketiga elemen tersebut saling memengaruhi satu sama lain dalam membangun masyarakat Islam yang memiliki kesadaran politik yang tinggi dan berperan secara aktif dalam kehidupan publik.

Berkaitan dengan pendidikan politik merupakan sebuah proses yang

berlangsung dalam lingkungan sekolah, dengan tujuan utama untuk menumbuhkan pemahaman, kesadaran, serta partisipasi individu dalam ranah politik. Pendidikan dapat dilaksanakan dalam dua bentuk, yaitu formal dan nonformal. Dalam konteks ini, pesantren menawarkan pendidikan politik nonformal yang berlandaskan pada ajaran nilai-nilai Islam dan syariat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2019), pendidikan politik di lingkungan pesantren diperkuat oleh pengembangan nilai-nilai kepemimpinan. Selain itu, keterlibatan santri dalam organisasi-organisasi yang ada di dalam pesantren juga turut berkontribusi. Diskusi mengenai isu-isu sosial dan politik yang relevan menjadi salah satu bagian penting dari proses ini.

Pesantren berperan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung dialog positif antara berbagai agama dan aspek politik. Para kiai kerap menyampaikan ceramah atau tausiyah yang memuat pesan-pesan politik yang diambil dari ajaran Islam (Al-Qur'an). Pesan-pesan tersebut mencakup nilai-nilai keadilan ('adl), prinsip amar ma'ruf nahi munkar, serta tanggung jawab sosial yang harus diemban oleh setiap individu. Pendidikan yang ditawarkan di pesantren kepada para santri mencakup pengajaran nilai-nilai Islam. Namun, nilai-nilai tersebut dapat dihubungkan melalui pemahaman akan sejarah perjuangan umat Islam, baik selama masa Nabi Muhammad maupun selama upaya para ulama dalam meraih kemerdekaan Indonesia. Dengan demikian, para santri mampu memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses politik, serta dapat mengevaluasi dengan bijak makna sesungguhnya dari politik itu sendiri. Politik seharusnya tidak dipandang sebagai hal yang negatif atau kotor.

Sebaliknya, dengan pendekatan yang tepat, politik dapat berfungsi sebagai sarana untuk beribadah dan berkontribusi bagi kebaikan masyarakat. Dengan mengembangkan kesadaran politik berbasis Islam yang dihasilkan dari pendidikan di pesantren, maka pelaksanaan politik seharusnya berlandaskan pada nilai-nilai moral dan ajaran agama. Keterlibatan dalam kehidupan berbangsa, seperti partisipasi dalam pemilu, mempunyai peranan yang sangat penting. Selain itu, kemampuan untuk bersikap kritis terhadap kebijakan atau tindakan pemerintah yang dianggap tidak adil juga menjadi hal yang krusial. Oleh karena itu, pesantren

memiliki peran penting dalam membentuk generasi muda yang tidak hanya memiliki pemahaman mendalam tentang agama, tetapi juga berkomitmen untuk terlibat dan berperan aktif dalam dinamika sosial-politik di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif dan mengandalkan metode studi kepustakaan atau literatur. Pemilihan metode ini berlandaskan pada tujuan penelitian yang ingin mencapai pemahaman mendalam mengenai peran pesantren dalam pembentukan kesadaran politik Islam di Indonesia. Penelitian ini akan dilakukan dengan menganalisis berbagai sumber data sekunder yang relevan dan dapat dipercaya. Pendekatan ini menawarkan fleksibilitas bagi para peneliti untuk mengeksplorasi berbagai ide, teori, dan temuan dari penelitian sebelumnya yang telah dipublikasikan dalam beragam sumber literatur. Ini mencakup jurnal akademis, buku, makalah ilmiah, dokumen resmi, serta referensi daring dari institusi keagamaan dan pemerintah.

Artikel ini mengkaji secara mendalam fungsi pesantren sebagai institusi pendidikan Islam dalam menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai politik yang berbasis pada ajaran Islam. Observasi ini dapat dilihat melalui dua aspek, yaitu aktivitas pendidikan yang dilakukan secara langsung dan pengaruh sosial-budaya yang ditunjukkan oleh para tokoh pesantren, terutama kiai, dalam kehidupan masyarakat. Dalam proses pelaksanaannya, penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data primer melalui wawancara atau observasi langsung. Sebaliknya, studi ini sepenuhnya memanfaatkan data sekunder sebagai sumber utama untuk analisis yang dilakukan.

PEMBAHASAN

Peran Pesantren Dalam Membentuk Kesadaran Politik Islam di Indonesia

Pendidikan politik di pesantren sejatinya telah dilakukan secara tidak resmi dan tanpa struktur yang jelas. Proses ini berlangsung tanpa adanya kurikulum yang secara khusus dirancang untuk mengajarkan isu-isu politik. Meskipun demikian, melalui beragam aktivitas harian yang memiliki nuansa kultural dan religius,

pesantren secara berkelanjutan membangun kesadaran politik di antara para santrinya. Menurut Mukodi (2016), terdapat lima jenis aktivitas utama yang berkontribusi signifikan dalam proses internalisasi nilai-nilai politik Islam, yaitu:

Pertama, forum musyawarah kitab kuning berfungsi sebagai wadah partisipatif yang memungkinkan santri untuk mengekspresikan pandangan mereka serta berdiskusi mengenai berbagai isu terkait agama dan pemerintahan. Dalam forum ini, para santri tidak hanya mendapatkan pemahaman tentang ajaran Islam tradisional, tetapi juga dilatih untuk menyampaikan pendapat, menerima perbedaan, serta berdiskusi mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara. Forum ini juga mengeksplorasi hubungan antara agama dan negara, serta aspek kepemimpinan yang penting.

Kedua, studi mengenai Al-Fiqh dan Alaal-Madhahib, khususnya Al-Arba'ah, menawarkan wawasan yang mendalam kepada para santri senior mengenai berbagai isu politik dan hukum. Pendekatan ini mengupas perspektif dari empat mazhab besar dalam Islam, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Diskusi mengenai tema bughat (pemberontakan) menjadi semakin penting ketika dihubungkan dengan peristiwa pemecatan Presiden Abdurrahman Wahid. Hal ini mendorong para santri untuk menggali pemahaman tentang dinamika politik dari perspektif hukum Islam klasik.

Ketiga, forum khitabiyah atau orasi ilmiah berperan sebagai alat untuk melatih keterampilan retorika serta menyampaikan ide-ide kritis. Forum ini sering kali mengeksplorasi berbagai isu yang berkaitan dengan kebijakan publik serta tantangan politik di tingkat nasional. Dalam forum ini, para santri sering kali menyampaikan pandangan mereka dengan penuh keterbukaan. Hal ini berkontribusi pada pengembangan keberanian dalam berpikir kritis serta meningkatkan sikap partisipatif mereka dalam ranah sosial-politik. Banyak individu yang nantinya akan berperan sebagai aktor politik dalam masyarakat, baik melalui jalur partai Islam maupun partai non-Islam.

Keempat, tradisi budaya demokrasi telah menjadi bagian yang kuat dalam kehidupan pesantren, khususnya terlihat dalam cara pemilihan guru dan kitab yang akan diajarkan. Mekanisme ini menggambarkan penerapan prinsip-

prinsip demokrasi di tingkat internal, yang pada gilirannya memperkuat pengalaman santri dalam proses pengambilan keputusan yang santun dan kolektif.

Kelima, penelitian Bahts Al-Masail berfungsi sebagai platform diskusi ilmiah yang mengeksplorasi isu-isu sosial dan keagamaan melalui lensa fiqh klasik. Dalam forum ini, peserta didik dilatih untuk melakukan analisis terhadap berbagai isu kebangsaan, pertahanan negara, dan politik nasional dengan pendekatan yang kontekstual dan ilmiah. Tujuan utama dari program ini adalah untuk memberikan santri kemampuan berpikir kritis serta responsif terhadap isu-isu sosial yang ada di masyarakat.

Kelima aktivitas tersebut mengindikasikan bahwa pesantren, meskipun tidak secara resmi mengatur kurikulum pendidikan politik, secara nyata telah berfungsi sebagai media sosialisasi nilai-nilai politik Islam yang bersifat moderat, toleran, dan relevan dengan konteks saat ini. Proses pendidikan politik yang berlangsung dengan pendekatan kultural dan transformatif ini menghasilkan generasi santri yang tidak hanya memahami agama secara mendalam, tetapi juga memiliki kesadaran politik yang kritis. Mereka menjadi individu yang berorientasi pada nilai-nilai etika Islam dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pendekatan atau Metode Yang Digunakan Pesantren Dalam Mentransformasikan Nilai-Nilai Politik Kepada Santri

Pendidikan multikultural merupakan sarana yang efektif dalam menanamkan semangat multikulturalisme positif kepada peserta didik muslim. Mengingat bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia beragama islam, maka muatan nilai – nilai multikultural dapat diberikan kepada peserta didik muslim di seluruh Indonesia melalui lembaga pendidikan, secara berjenjang sesuai dengan jenjang pendidikan yang di tempuh oleh peserta didik. Dengan demikian terdapat kesamaan pandangan peserta didik muslim di seluruh pelosok nusantara dalam menyikapi perbedaan etnis, budaya, dan agama.

Prinsip I'tidal (keadilan) merupakan sikap tengah atau moderat yang tidak cenderung ke kanan atau kiri. Dalam konteks interaksi sosial pada komunitas yang

majemuk, pemikiran moderat ini sangat urgen dalam mengakomodir Beragam kepentingan dan perselisihan, lalu berikhtiar mencari solusi yang paling aslah (terbaik). Konsep moderat tersebut sejalan dengan konsep ummatan wasatan. Dalam konsep pendidikan multikultural fokus dari pendidikan multikultural tidak lagi diarahkan semata-mata pada kelompok rasial, agama, dan cultural domain atau mainstream. Fokus demikian ini pernah menjadi tekanan pada pendidikan intercultural yang menekankan peningkatan pemahaman dan toleransi individu-individu yang berasal dari kelompok minoritas terintegrasi ke dalam masyarakat mainstream.

Pendidikan multikultural sebenarnya merupakan sikap “peduli” dan mau mengerti (*difference*) atau “*politic of recognition*” politik pengakuan terhadap orang-orang dari kelompok minoritas. Dalam konteks tersebut, pendidikan multikultural melihat masyarakat secara lebih luas. Berdasarkan pandangan dasar bahwa sikap “*indifference*” dan “*non-recognition*” tidak hanya berakar dari ketimpangan struktur rasial, tetapi paradigma pendidikan multikultural mencakup subyek-subyek mengenai ketidakadilan, kemiskinan, penindasan, dan keterbelakangan kelompok-kelompok minoritas dalam berbagai bidang sosial, budaya, ekonomi, pendidikan dan lain lain.

Tidak mengherankan kemudian pesantren diklaim sebagai institusi yang signifikan dalam pendidikan multikultural dan perdamaian Indonesia. Paling tidak dapat terlihat beberapa faktor seperti :

Pertama, dalam proses pendidikan mengakomodir (akulturasi) budaya sekitar, bukan menegasikan. Pesantren juga tidak bisa dilepaskan juga dari sejarah masuknya islam di Indonesia. Pesantren dengan tokoh utamanya yakni para ulama dari negeri-negeri muslim menggunakan jalan kooperatif, pendekatan tradisi dan berdasarkan moralitas akhlak ketimbang jalan kekerasan. Hal tersebut dapat dibaca dari tradisi wali songo yang menggunakan cara-cara perdamaian dalam dakwahnya.

Kedua, proses pendidikan yang mengakomodir perbedaan atau heterogen. Berkembangnya pesantren menjadi sebuah lembaga pendidikan modern merupakan penegasan bahwa pesantren merupakan sebuah implementasi

pendidikan multikultural. Pesantren berkembang dari zaman ke zaman serta menjunjung semangat pluralism dalam pendidikan, bukan hanya kesetaraan pendidikan. Bentuk nyata pesantren dalam menanamkan pendidikan multikultural dapat dibuktikan dengan santri-santrinya yang berasal dari berbagai pelosok tanah air dan bahkan mancanegara.

Ketiga, umumnya kurikulum pesantren, baik pesantren modern maupun tradisional, mengusung konsep moderat yang dibuktikan dengan dominannya kitab-kitab kelompok ulama pendukung budaya damai seperti Al-Ghazali, Al-Syafi'I dan lain sebagainya.

Keempat, ilmu yang diajarkan dilingkungan pesantren tidak hanya ilmu agama, melainkan santri dibekali berbagai macam ilmu, bahkan ada terdapat santri yang tidak menuntut ilmu, hanya mengabdikan diri. Konsep semacam ini akan memberikan pemahaman santri akan pentingnya melihat sebuah situasi dari berbagai sudut pandang, tidak hanya melalui kaca mata keagamaan semata, melainkan menggunakan kacamata yang beragam.

Tantangan yang dihadapi Pesantren dalam Mengembangkan Kesadaran Politik Islam di Tengah Masyarakat yang Majemuk

Dalam realitas masyarakat Indonesia yang plural, baik dari segi etnis, agama, budaya, maupun ekspresi politik, pesantren menghadapi tantangan besar dalam memainkan peran strategisnya sebagai institusi pendidikan Islam. Peran ini bukan hanya terbatas pada pengajaran ilmu-ilmu keislaman klasik, melainkan juga sebagai pusat pembentukan kesadaran kritis dan kesadaran politik Islam yang mampu berdialog secara konstruktif dengan kompleksitas masyarakat majemuk. Namun, tantangan tersebut tidak sederhana. Ia mengandung kontradiksi-kontradiksi inheren, baik dari dalam tubuh pesantren itu sendiri maupun dari tekanan lingkungan eksternal yang terus berubah, terutama dalam konteks kemajuan teknologi informasi dan transformasi sosial yang cepat.

Secara historis, pesantren telah memainkan peran penting dalam proses penyebaran Islam di Indonesia serta dalam perjuangan kemerdekaan bangsa. Di masa kolonial, pesantren berdiri sebagai simbol perlawanan terhadap sistem

pendidikan kolonial yang sekuler dan eksklusif. Namun dalam perkembangan kontemporer, pesantren berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, ia dituntut untuk tetap menjaga otentisitas nilai-nilai tradisional dan otoritas keilmuan berbasis kitab kuning. Di sisi lain, pesantren tidak dapat menutup diri dari tuntutan modernitas, yang mencakup transformasi dalam pendekatan pembelajaran, integrasi teknologi informasi, hingga partisipasi dalam membangun kesadaran politik Islam yang progresif. Menurut Lailiyah dan Wahid (2024), transformasi sosial dan budaya yang mengitari pesantren pada era kontemporer menuntut pesantren agar mampu menyeimbangkan antara pelestarian tradisi dan kebutuhan akan inovasi yang adaptif terhadap zaman.

Salah satu tantangan mendasar yang dihadapi oleh pesantren adalah bagaimana mengembangkan kesadaran politik Islam yang tidak hanya berbasis pada teks dan hukum, tetapi juga pada kesadaran struktural tentang realitas sosial yang kompleks. Dalam banyak pesantren, proses pembelajaran masih didominasi oleh metode pengajaran tradisional yang bersifat monologis, mengandalkan hafalan teks dan pembacaan literal terhadap kitab-kitab klasik. Akibatnya, kemampuan analitis santri terhadap dinamika sosial-politik yang terjadi di sekitarnya menjadi sangat terbatas. Pendidikan yang tidak diarahkan pada pengembangan kesadaran kritis cenderung menghasilkan lulusan yang pasif, tidak memiliki kepekaan terhadap struktur ketidakadilan sosial, serta mudah terjebak pada wacana-wacana populis yang eksklusif.

Ahmad Taufiq (2019) menjelaskan bahwa dalam konteks era disrupsi dan revolusi industri 4.0, pengembangan kesadaran kritis merupakan prasyarat penting untuk melahirkan manusia-manusia yang memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi, kreatif, dan inovatif. Kesadaran kritis ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari proses pendidikan yang mendorong peserta didik untuk bertanya, menganalisis, dan mentransformasikan realitas. Dalam kerangka ini, pesantren seharusnya tidak hanya mengajarkan fiqh siyasah dalam bentuk doktrinal, tetapi juga memberikan ruang dialog untuk memahami fenomena politik kontemporer secara reflektif dan kontekstual.

Di sisi lain, arus globalisasi dan kemajuan teknologi digital membawa

dampak yang ambivalen bagi pesantren. Di satu sisi, ia membuka akses yang lebih luas terhadap informasi dan memperluas jejaring komunikasi. Namun di sisi lain, teknologi digital juga membawa ancaman berupa penyebaran informasi yang tidak valid, propaganda politik berbasis identitas, serta polarisasi masyarakat melalui media sosial. Dalam situasi seperti ini, santri yang seringkali tidak memiliki literasi media yang memadai berisiko menjadi korban narasi politik yang manipulatif. Suryani (2022) menyatakan bahwa disrupsi digital telah menggeser ketergantungan pada ruang fisik menuju ruang virtual, dan hal ini mempengaruhi cara santri memaknai realitas sosial-politik. Ketika pesantren tidak membekali santri dengan kemampuan literasi digital dan politik yang kuat, maka akan sulit bagi mereka untuk mengambil posisi kritis dan konstruktif dalam masyarakat.

Tantangan lain yang signifikan datang dari aspek kurikulum dan kelembagaan. Banyak pesantren yang belum memiliki kurikulum politik Islam yang holistik dan aplikatif. Pendidikan politik di pesantren umumnya hanya mencakup pemahaman teoritis tentang sistem pemerintahan Islam klasik seperti khilafah atau imamah, yang kemudian dikaitkan secara normatif dengan teks-teks fiqh. Pendekatan ini penting, namun tidak cukup untuk menjawab kompleksitas politik modern dalam sistem demokrasi Indonesia yang pluralistik. Menurut Samsudin (2019), tantangan bagi pesantren di era disrupsi adalah bagaimana menyiapkan santri yang tidak hanya paham ilmu agama, tetapi juga memiliki keterampilan sosial dan politik untuk beradaptasi serta berkontribusi dalam perubahan sosial.

Hal yang tidak kalah penting adalah soal identitas dan relasi antar kelompok. Dalam masyarakat yang sangat plural seperti Indonesia, kesadaran politik Islam yang dikembangkan di pesantren harus bersifat inklusif, bukan eksklusif. Ia harus mampu mengajarkan nilai-nilai keislaman yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan penghormatan terhadap perbedaan. Sayangnya, tidak sedikit pesantren yang masih terjebak dalam pola pikir eksklusif dan puritan, yang cenderung memandang kelompok di luar dirinya sebagai 'lain' yang harus dijauhi atau bahkan dilawan. Dalam konteks ini, Manshuruddin (2019) menekankan pentingnya modernisasi pendidikan Islam yang

tidak hanya berorientasi pada aspek kognitif, tetapi juga pembentukan sikap keberagaman yang moderat dan terbuka.

Pesantren harus mampu menjadi lokus pengembangan Islam rahmatan lil ‘alamin yang tidak hanya berfokus pada isu-isu ritual dan hukum, tetapi juga pada komitmen terhadap keadilan sosial, pemerataan ekonomi, dan perlindungan terhadap kelompok marginal. Untuk itu, dibutuhkan reformasi kelembagaan di dalam pesantren, baik dalam aspek manajemen, metode pembelajaran, hingga struktur kurikulum. Pesantren harus membuka diri terhadap kolaborasi dengan berbagai pihak, baik pemerintah, organisasi masyarakat sipil, maupun lembaga pendidikan tinggi, untuk memperkaya wawasan dan kapasitas institusionalnya dalam mengembangkan pendidikan politik Islam yang relevan dan berdaya transformasi.

Dalam kondisi seperti ini, pesantren sebaiknya tidak lagi ditempatkan semata sebagai benteng pertahanan moral atau simbol kejayaan masa lalu, tetapi harus menjadi pusat produksi pengetahuan sosial-politik Islam yang adaptif, kritis, dan progresif. Pembentukan kesadaran politik Islam yang mampu hidup berdampingan dalam masyarakat majemuk hanya mungkin terjadi apabila pesantren berani melakukan transformasi epistemologis dan pedagogis, tanpa kehilangan akar tradisinya. Upaya ini bukan sekadar proyek akademik, tetapi bagian dari jihad kultural untuk memperkuat posisi umat Islam sebagai pelaku aktif dalam membangun masyarakat yang adil, beradab, dan demokratis.

Dampak Pembentukan Kesadaran Politik Islam Melalui Pesantren terhadap Partisipasi Politik Umat Islam

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia memiliki peran signifikan dalam membentuk kesadaran politik umat Islam. Selain fungsi pendidikannya, pesantren juga berfungsi sebagai agen sosial-politik yang menginternalisasikan nilai-nilai demokrasi dan tanggung jawab politik melalui jalur informal. Peran ini semakin penting dalam era demokrasi, di mana partisipasi politik umat Islam menjadi salah satu pilar penguatan sistem pemerintahan yang inklusif. Menurut Wahyuddin G., peran politik umat Islam dalam sejarah bangsa

Indonesia sangat menonjol, bahkan sejak masa perjuangan kemerdekaan. Peran ini tak bisa dilepaskan dari kontribusi pesantren dan para tokohnya dalam membangun kesadaran politik masyarakat muslim melalui pendekatan keagamaan (Wahyuddin, 2016).

Di lingkungan pesantren, kiai menjadi sosok sentral yang tidak hanya mengajar agama tetapi juga membimbing umat dalam kehidupan sosial-politik. Kiai merupakan figur patron dalam sistem patron-klien di pesantren. Hubungan emosional dan spiritual antara santri dan kiai membentuk pola kepatuhan yang tinggi, termasuk dalam hal orientasi politik (Nasikin, 2014). Dalam konteks ini, pembentukan kesadaran politik tidak bersifat instruktif, tetapi transformasional, di mana nilai-nilai Islam dijadikan dasar berpikir dan bertindak dalam kehidupan kenegaraan.

Fenomena tersebut dibuktikan dalam penelitian Ari Alfiatul Rochmah di Pondok Pesantren Al-Muayyad, Solo. Ia menunjukkan bahwa kesadaran politik santri terbentuk melalui dimensi Islamisme, terutama ketika Islam diposisikan sebagai ideologi politik. Kesadaran input (minat terhadap isu politik), kesadaran output (dampak kebijakan), hingga orientasi pilihan politik semuanya sangat dipengaruhi oleh ajaran kiai dan nilai-nilai keislaman yang ditanamkan di pesantren (Rochmah, 2016). Pesantren juga memiliki kekuatan simbolik di ruang publik. Dalam dinamika politik praktis, keterlibatan pesantren dalam mendukung tokoh atau partai tertentu dapat menjadi penentu suara umat Islam. Namun, keterlibatan ini bukan tanpa risiko.

Menurut Saidin Ernas dan Ferry Siregar, keterlibatan pesantren dalam politik praktis sering kali mengundang resistensi dari masyarakat, khususnya bila dianggap melenceng dari nilai-nilai ideal keislaman atau terlalu partisan (Ernas & Siregar, 2010). Dalam beberapa kasus, seperti yang terjadi di Yogyakarta, keterlibatan pesantren secara langsung dalam politik justru menurunkan legitimasi pesantren di mata sebagian masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya pergeseran peran pesantren dari lembaga moral ke lembaga politik praktis, yang bisa menimbulkan konflik kepentingan dan penurunan kepercayaan publik (Ernas & Siregar, 2010).

Sementara itu, dalam konteks struktural, pesantren sering kali

dimanfaatkan sebagai basis kekuatan oleh partai-partai berbasis Islam. Menurut Hairul Rizal, keterlibatan pesantren dalam politik sering didasarkan pada ajaran agama yang memerintahkan partisipasi umat dalam urusan kenegaraan. Faktor agama terbukti menjadi motivasi utama masyarakat dalam memilih calon pemimpin, sebagaimana terjadi dalam Pilpres 2014 di Ngaglik, Sleman, di mana 75% responden menyatakan bahwa partisipasi mereka didorong oleh kesadaran sebagai warga negara muslim (Rizal, 2014).

Di samping itu, dalam perspektif politik internasional, pesantren memainkan peran penting dalam membangun solidaritas umat Islam global. Pesantren dapat menjadi medium konsolidasi kesadaran umat terhadap isu-isu dunia Islam seperti Palestina atau kebijakan internasional yang menyentuh umat. Muhammad Husen Haikal menegaskan bahwa politik Islam tidak hanya berpengaruh dalam skala domestik, tetapi juga internasional, dan pesantren adalah salah satu elemen penting dalam diplomasi keumatan (Haikal, 2024).

Namun, pesantren juga dihadapkan pada tantangan modernisasi. Dalam era digital dan keterbukaan informasi, pesantren perlu memperbarui sistem pengajarannya agar dapat mengajarkan nilai-nilai politik yang sesuai dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan akar keislaman. Manshuruddin menekankan pentingnya pendidikan pesantren modern yang adaptif terhadap perubahan global tanpa kehilangan jati diri Islamnya (Manshuruddin, 2019). Dengan demikian, dampak pembentukan kesadaran politik Islam melalui pesantren terhadap partisipasi politik umat Islam sangat signifikan. Pesantren tidak hanya mencetak generasi yang taat secara spiritual, tetapi juga sadar akan tanggung jawab sosial dan politiknya sebagai warga negara. Namun, agar dampak tersebut tetap positif, keterlibatan pesantren dalam politik harus dijaga agar tetap berada dalam koridor nilai-nilai etis Islam dan menjauh dari pragmatisme kekuasaan.

SIMPULAN

Pesantren memainkan peranan penting dalam memperkuat pemahaman politik Islam yang bersifat terbuka, moderat, dan menghormati eksistensi negara. Melalui berbagai kegiatan seperti diskusi kitab kuning, forum khitabiyah, praktik

demokrasi dalam institusi, serta pembahasan Bahts al-Masail, pesantren secara implisit menyampaikan nilai-nilai politik kepada para santri. Metode ini didukung oleh pendidikan multikultural yang menekankan nilai-nilai penting seperti toleransi, keadilan, dan penghormatan terhadap perbedaan antarbudaya. Namun, pesantren tidak lepas dari berbagai tantangan signifikan. Di antaranya adalah rendahnya tingkat literasi politik digital, pengaruh globalisasi yang kian meluas, serta kebutuhan untuk memperbarui kurikulum agar lebih relevan dan praktis dengan kondisi zaman sekarang.

Dalam konteks pesatnya perkembangan digital dan keragaman masyarakat saat ini, pesantren diharapkan mampu beradaptasi dengan melakukan transformasi sambil tetap mempertahankan tradisi yang ada. Dengan cara ini, pesantren dapat terus berperan sebagai penggerak kesadaran politik Islam yang kritis dan progresif. Sebagai sebuah institusi keagamaan dan pendidikan, pesantren memainkan peran yang signifikan dalam memengaruhi partisipasi politik di kalangan masyarakat Islam. Keterlibatan kiai serta struktur pesantren dalam arena politik mencerminkan adanya pengaruh simbolis dan kekuatan moral yang cukup signifikan. Namun, partisipasi ini harus dilandasi oleh etika dan prinsip netralitas yang sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Perlu dilakukan reformasi pada struktur kurikulum dan metode pembelajaran. Pesantren harus fokus pada pengembangan kurikulum politik Islam yang komprehensif dan relevan dengan tantangan zaman modern. Selain itu, penting untuk merancang metode pengajaran yang mendorong interaksi dan analisis, sehingga santri dapat lebih mendalami dan memahami konteks sosial-politik yang ada. Peningkatan keterampilan digital dan wawasan politik di kalangan santri. Di tengah perkembangan informasi yang begitu cepat, penting bagi pesantren untuk membekali santri dengan kemampuan dalam menyaring informasi, memahami dinamika politik, serta memanfaatkan media secara cerdas dan beretika.

Kesadaran politik yang diberikan di pesantren seharusnya berlandaskan pada nilai-nilai keadilan sosial, demokrasi, dan pengakuan akan keragaman. Penting bagi santri untuk menghindari sikap eksklusif dalam beragama, agar mereka tidak terjebak dalam pandangan yang sempit. Kolaborasi antara pesantren dan institusi

eksternal. Pesantren diharapkan dapat mengadopsi sikap yang lebih terbuka dalam menjalin kolaborasi dengan universitas, lembaga masyarakat sipil, dan pemerintah. Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas institusi pesantren serta memperluas wawasan politik bagi semua pihak yang terlibat. Menjaga keutuhan pesantren dari pengaruh praktik politik yang bersifat pragmatis. Partisipasi dalam arena politik hendaknya senantiasa berlandaskan nilai-nilai ideal yang diajarkan dalam Islam, tanpa terjebak dalam kepentingan sesaat atau partisan. Dengan demikian, pesantren memiliki peran penting dalam memelihara moralitas masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adib, A. 2021. Metode pembelajaran kitab kuning di Pondok Pesantren. *Jurnal Mubtadiin*, 7(01), 232-246
- Asror, M. 2022. Implementasi Pendidikan Multikultural Dalam Upaya Mengembangkan Sikap Toleransi Santri Di Pondok Pesantren. *MindSet: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 42-53.
- Almond, G. A., & Verba, S. 1963. *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Princeton University Press.
- Bakti, S., Salminawati., & Usiono 2023. Pondok Pesantren Modern: Politik Pendidikan Islam dan Problematika Identitas Muslim. Edukatif: *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 5(6), 2902–2915.
- Dhofier, Zamakhsari. 2011 *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES,.
- Ernas, S., & Siregar, F. M. 2010. Dampak Keterlibatan Pesantren dalam Politik: Studi Kasus Pesantren di Indonesia. *Kontekstualita*, 25(2), 198–199.
- Fadjar, M. 1999. *Madrasah dan Tantangan Modernitas*. Bandung: Mizan.
- Hadi, M. S., & Zamroni. 2023. Pendidikan Politik dan Partisipasi Pemilu di Pesantren: Perspektif Nilai-nilai Pendidikan Islam. *Maktabah Borneo*, 1(1), 1–15.
- Haedari, A. I. 2004. *Peta Dunia Pesantren di Indonesia*. Jakarta: Ciputat Press.
- Haikal, M. H. 2024. Peran Politik Islam Dalam Dinamika Pemerintahan: Perspektif Dalam Negeri dan Luar Negeri. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(2).
- Haryanto, A. 2017. Peran Pesantren dalam Sosialisasi Politik Umat Islam. *Jurnal Politik Islam*, 9(2), 150–165.
- Hayah, M. A., & Zahro, N. F. 2022. Kiprah Kiai & Pesantren dalam Pergulutan Politik Nasional di Indonesia. *Jurnal Pikir: Jurnal Studi Pendidikan Dan Hukum Islam*, 8(2), 121-140.
- Hermawan, R., & Ngindana, R. 2020. Pendidikan Politik Kebangsaan Berbasis

- Pesantren. *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)*, 3(2), 154-165.
- Lailiyah, F., & Wahid, A. 2024. Tantangan Pesantren dalam Menyeimbangkan Tradisi dan Modernitas di Era Kontemporer. *Oasis: Jurnal Ilmiah Kajian Islam*, 9(1), , hlm. 79–83.
- Manshuruddin. 2019. Pondok Pesantren Modern: Politik Pendidikan Islam dan Tantangan Identitas Muslim. *Al-Hadi*, 5(1), 1034–1038.
- Mastuhu. 1994. *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*. Jakarta: INIS.
- Malik, S. 2020. Implementasi Manajemen Pendidikan Multikultural di Pondok Pesantren Al Muqoddas Tukmudal Sumber Kabupaten Cirebon. *Eduprof: Islamic Education Journal*, 2(1), 128-148.
- Mukodi, M. 2016. Pesantren Dan Pendidikan Politik Di Indonesia: Sebuah Reformulasi Kepemimpinan Islam Futuristik. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 16(2), 461-484.
- Mukodi, M. 2020. Kurikulum dan Pendidikan Nasionalisme di Pondok Pesantren Tremas. *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 15(1), 14-27.
- Nasikin, A., & Yani. M. T. 2014. Kepemimpinan Kiai dan Partisipasi Politik Santri di PP Al-Ishlah Prambon, Tuban. *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 1(2), 91-107.
- Nugroho, T. 2019. Ideologi Pendidikan Pondok Pesantren Al-Islam Tenggulun Solokuro Lamongan. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 9(2), 97-112.
- Padli, E. 2023. Pendidikan Multikultural Pesantren di Indonesia. *Fikroh:(Jurnal Studi Islam*, 7(2), 146-155.
- Rabani, A. 2024. *Analisis Peran Pondok Pesantren dalam Pembentukan Kesadaran Politik Islam di Indonesia*. Skripsi, UIN Mataram.
- Rizal, H. 2014. Islam dan Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat di Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman dalam Pilpres 2014. *In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 3(2), 332-346.
- Rizqya. F., & Afdholy, N. 2024. Nderek Kiai: Santri dalam Ideologi Politik Indonesia 2024. *Madah: Jurnal Bahasa dan Sastra*, 15(2), 230–241.
- Rochmah, A. A. 2016. *Budaya Politik dan Islamisme: Mengukur Tingkat Pengaruh Islamisme terhadap Kesadaran Politik Santri di Kota Solo*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Samsudin. 2019. “Tantangan Lembaga Pendidikan Pesantren di Era Disrupsi.” Conference on Islamic Studies (CoIS), Universitas Islam Sultan Agung,
- Suryani, K. 2022. Tantangan dan Peluang Pendidikan Islam di Pesantren pada Era Disrupsi. *Multicultural: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(1), 23–27.
- Taufiq, A. 2019. “Pengembangan Kesadaran Kritis di Pesantren dalam Menghadapi Tantangan Revolusi Industri 4.0.” Prosiding Seminar Nasional LP2M UIN Sunan Ampel Surabaya, vol. 2, hlm. 75–82.
- Wahid, A. 2001. *Pesantren Sebagai Subkultur*. Yogyakarta: LKiS,.
- Wahyuddin. 2016. Partisipasi Umat Islam dalam Pembangunan Politik: Perjuangan Kemerdekaan dan Mengisi Kemerdekaan. *Jurnal Rihlah*, 4(1).

- Wiriyosukarto, S. 1996. *Pendidikan di Indonesia dari Zaman ke Zaman*. Jakarta: Badan Litbang Pendidikan dan Kebudayaan,
- Yahya, I. 2014. Demokrasi Pesantren: Menebar Format Politik yang Damai. *At-Taqaddum*, 6(2), 187–200.
- Zahro, F., & Saputri, F. I. 2024. Polarisasi Politik di Lingkungan Pondok Pesantren dalam Pemilihan Umum 2024. *Al-Manabia: Journal of Constitutional Law*, 4(1), 21–36.